

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/345775038>

POTENSI WILAYAH PESISIR DI NEGARA INDONESIA

Article in *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* · November 2020

CITATIONS

13

READS

18,284

2 authors, including:



Mukhamad Fredy Arianto
Universitas Negeri Surabaya

2 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



ILMU WILAYAH [View project](#)

POTENSI WILAYAH PESISIR DI NEGARA INDONESIA

MUKHAMAD FREDY ARIANTO

S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang No. 18, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

ABSTRAK

Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 92⁰ sampai 142⁰ BT, terdiri dari pulau - pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang- Undang No.17 Tahun 1985, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km² terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia tersimpan potensi-potensi dan jasa lingkungan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci : pesisir, wilayah, Indonesia, kepulauan

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia membentang dari 6⁰ LU sampai 11⁰ LS dan 92⁰ sampai 142⁰ BT, terdiri dari pulau - pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada.

Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan

Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang - Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas

kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Pasal 25A UUD 1945 (hasil amandemen kedua UUD 1945), menyebutkan bahwa “NKRI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Ini semakin mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim. Apalagi dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, lebih jelas mengakui eksistensi sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat belum dimanfaatkan secara optimal, padahal tersimpan potensi SDA dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Sehingga untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai arus utama pembangunan nasional dibutuhkan kebijakan pembangunan yang terpadu dan berbasis ekosistem.

PEMBAHASAN

Potensi Wilayah

Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar

benua. Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang 12 mil dari garis dasar). Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu, ada juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan2 lainnya.

Potensi Sumber Daya Hayati

Indonesia sebagai negara tropis, kaya akan sumberdaya hayati, yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari : ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton) , cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang

dibolehkan (JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di 9 (sembilan) wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Potensi budidaya laut, terdiri dari potensi budidaya ikan (kakap, kerapu, gobia); udang, moluska (kerang-kerangan, mutiara, teripang); dan rumput laut, potensi luasan budidayanya sebesar 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan pesisir dan laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Sedangkan potensi budidaya payau (tambak) mencapai 913.000 ha. Untuk potensi bioteknologi kelautan masih besar peluangnya untuk dikembangkan, seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, dan benih ikan dan udang.

Perairan Indo-Pasifik, yang sebagian besar terletak di perairan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia, dengan lebih dari 400 spesies. Juga berbagai jenis ganggang laut tersebar di berbagai wilayah pantai. Sumber daya hayati laut kita, selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi juga mempunyai luas habitat yang besar, yaitu : 2,4 juta ha kawasan hutan bakau dan 8,5 juta ha terumbu karang. Secara biologi, kawasan pesisir dan laut

Indonesia juga mempunyai nilai global, karena perairan Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi (*highly migratory species*) seperti tuna, lumba-lumba dan berbagai jenis ikan paus serta penyu. Potensi kelautan dan perikanan di atas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mempunyai nilai potensi ekonomi masing-masing : perikanan tangkap US\$ 15,1 miliar per tahun; budidaya laut US\$ 46,7 miliar per tahun; budidaya tambak US\$ 10 miliar per tahun dan bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun.

Potensi Sumber Daya Mineral Dan Energi

Sekitar 70 % produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik. Selain itu kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti : emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat. Di perairan pesisir dan laut Indonesia, juga ditemukan jenis energi baru pengganti

BBM, berupa gas hidrat dan gas bionik di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi Indonesia.

Selain sumber energi diatas, terdapat juga sumber-sumber energi non konvensional seperti : energi pasang surut, energi gelombang, OTEC (*ocean thermal energy conversion*), tenaga surya dan angin. Potensi sumberdaya mineral lainnya yang dapat dikembangkan adalah air laut dalam (*deep ocean water*). Air laut dalam merupakan air di kedalaman 200 m, memiliki karakteristik yang berguna untuk kepentingan perikanan, kosmetika dan air mineral.

Potensi Industri Dan Jasa Maritim

Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, maka industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah: a).Galangan (pembuatan) kapal dan dockyard; b).Industri mesin dan peralatan kapal; c).Industri alat penangkapan ikan (*fishing gears*) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d).Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e).Offshore engineering and structures; f).Coastal engineering and structures;

g).Kabel bawah laut dan fiber optics; h).Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Potensi Transportasi Laut Dan Jasa Lingkungan

Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik, dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan di transportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US\$ 1.300 triliun per tahun. Sejak 1987, Indonesia menghamburkan devisa rata-rata US\$ 14 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing. Sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia, diangkut oleh kapal-kapal asing dan sekitar 55% dari total barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia, diangkut juga oleh kapal-kapal asing.

Dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton per tahun (200 juta ton batubara; 55 juta ton crude oil; 60 juta ton CPO; 7 juta ton produk perikanan; 8 juta ton LNG; 2 juta ton LPG; 120 juta ton containers dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan *cluster maritime* kita bisa meraup devisa perhubungan laut US\$ 15 miliar setiap tahun-nya (IMPC, 2008

dalam Dahuri 2009). Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan, dengan total investasi sebesar US\$ 5 miliar. Selain mening- katkan pendapatan negara, *cluster maritime* juga menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya 1 juta orang, membangkitkan sejumlah *multiplier effects*, mendorong daya saing ekonomi nasional, juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan *hub port*. Dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki, tidak satupun memenuhi standar pelayanan internasional.

Tahun 2000, Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 km memiliki 3000 pelabuhan perikanan, artinya setiap 11 km garis pantai terdapat 1 (satu) pelabuhan perikanan. Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km memiliki 52 pelabuhan perikanan, artinya setiap 50 km garis pantai mempunyai 1 (satu) buah pelabuhan perikanan. Sementara, Indonesia dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km, hanya memiliki 17 pelabuhan perikanan, artinya setiap 4.500 km garis pantai hanya memiliki 1 (satu) buah pelabuhan perikanan.

Negara bagian Queensland, Australia dengan panjang garis pantai 2.100 km, tahun 2007 pariwisata baharinya meraup devisa sebesar US\$ 3 milyar. Indonesia dengan panjang garis

pantai 95.200 km dan 6 terumbu karang (Raja Ampat, Wakatobi, Tukang Besi, Bunaken, Gili IMT, dan P. Rubiah) dari 10 terumbu karang terindah di dunia, total devisa pariwisatanya hanya US\$ 5 milyar.

Posisi Indonesia yang strategis, dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain, seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati lautnya, menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya. Prospek ini tentu didukung oleh bergesernya kebutuhan masyarakat global akan kehidupan *back to nature*, dimana mereka telah jenuh dengan kehidupan dalam lingkungan buatan. Estimasi nilai potensi ekonomi pariwisata bahari di Indonesia sebesar US\$ 54.3 miliar per tahun.

Potensi Kultural

Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Saat ini diperkirakan terdapat 463 titik lokasi kapal tenggelam, yang terjadi sejak abad 14 sampai abad 19. Pemerintah telah membentuk Panitia Nasional BMKT melalui Keppres No.107 Tahun 2000, agar

pemanfaatan BMKT dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara, serta mencegah pengangkutan BMKT secara ilegal. Nilai BMKT secara keseluruhan diperkirakan mencapai US\$ 40 juta.

Dari potensi sumberdaya pesisir dan lautan di atas, sedikitnya terkait dengan 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan yaitu : 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budidaya, 3) industri pengolahan hasil perikanan, 4) industri bioteknologi kelautan, 5) pertambangan dan energi, 6) pariwisata bahari, 7) perhubungan laut, 8) industri dan jasa maritim, 9) sumberdaya pulau-pulau kecil, 10) coastal forestry (mangrove), dan 11) SDA non konvensional.

Sektor ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan/atau yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan *goods and services* yang dibutuhkan umat manusia (Kildow, 2005 dalam Dahuri 2010). Menurut PKSPL- IPB 2009, total potensi ekonomi kelautan Indonesia : sebesar US\$ 1.200 miliar/tahun.

KESIMPULAN

Secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang

jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*). Namun faktanya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama ini masih jauh dari harapan.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran, mengingat kawasan ini memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas. Dengan lahirnya UU No.27 Tahun 2007, telah memberikan makna strategis sekaligus tantangan bagi implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Hal yang paling penting untuk menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan pembangunan adalah perlunya perubahan paradigma pembangunan. Dimana pendekatan pembangunan selama ini yang lebih berorientasi darat, harus dirubah menjadi berorientasi ke laut, dengan lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Selain itu, dengan adanya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir

dan laut ke daerah (kabupaten/kota dan provinsi), maka upaya peningkatan kualitas SDM di daerah perlu dilakukan sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan kelautan dan perikanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri R. 2010. Positioning Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Kelautan Nasional. Bahan Kuliah Umum di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT Manado.
- Dahuri R, J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paratima. Jakarta
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil-DKP. 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta
- Kusumastanto T. Makalah. Ocean Policy dalam Membangun Negara Bahari. PKSPL IPB
- Numberi F. 2009. Evolusi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Evolusi Kelautan Nusantara. Bogor. 32 p
- Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar.
- Sujoko A. 2011. Akankah nelayan bebas dari kemiskinan. <http://opiniperikanan.wordpress.com>. di akses tanggal 3 Juni 2012.
- United Nations, United Nations Convention on The Law of The Sea, 10. December 1982.
- Richard Davis, Coastal Sedimentary Environments. June 1978
- Robert Nicholls, Benefits of mitigation of climate change for coastal areas, 03. October 2004.